

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Budidaya Perikanan merupakan kegiatan pemeliharaan biota air di lingkungan yang terkontrol. Kegiatan budidaya perikanan mencakup kegiatan budidaya air tawar, air laut dan air payau (Sukadi 2002). Pesisir Selatan memiliki sumber daya alam dan potensi yang baik untuk kegiatan perikanan. Panjang Pantai Kabupaten Pesisir Selatan adalah 218. Jumlah sungai besar adalah 22 buah dengan panjang sungai 663,42 km. Area lahan basah (wetland) seluas 5.749,89 km². Curah Hujan di Kabupaten Pesisir Selatan 2.197 mm³ dengan jumlah rata-rata sebanyak 134 hari (BPS Kab. Pesisir Selatan 2018).

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi ketersediaan air yang tinggi. Pengembangan budidaya perikanan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat. Pengembangan Perikanan Budidaya oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan berbagai program.

Program utama yang menjadi prioritas dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Program Dana Alokasi Khusus (DAK). Program DAK bertujuan untuk menjamin pembangunan kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/Permen-Kp/2018).

Berdasarkan Permen KP No.47 Tahun 2018, Pelaksanaan Kegiatan DAK mencakup pengerjaan kegiatan dan kegiatan penunjang. Pagu dana yang digunakan untuk DAK 2019 adalah sebanyak 5% dari Jumlah dana DAK. Pelaporan Keuangan dan Kegiatan merupakan bentuk dari akuntabilitas, maka kegiatan penunjang DAK tersebut dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2. Tujuan

1. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Kegiatan Provinsi melalui Anggaran tersebut
2. Mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya

3. Meningkatkan jumlah dan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan
4. Meningkatkan kemampuan usaha pembudidaya ikan
5. Meningkatkan Ekonomi dalam usaha budidaya Ikan.

1.3. Sasaran

1. Tersalurkannya 1 (satu) paket bantuan sarana pembudidayaan ikan kepada penerima bantuan dengan melalui dana Pendampingan Pusat dan Provinsi.
2. Tersalurnya dana bantuan tersebut melalui APBD dan Dinas Perikanan
3. Pokdakan yang dibantu Pemerintah Pusat dan Provinsi yang didampingi Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan adalah:
 - a. Pokdakan Sungai Tigo, kegiatan mina padi
 - b. Pokdakan Palak kapeh, bantuan benih nila dan pakan
 - c. Pokdakan Lambau Jaya, bantuan sarana dan prasarana lele bioflok
 - d. Pokdakan Karang Sapau, benih kerapu, pakan dan obat-obatan
 - e. Pokdakan Maju Bersama, benih kerapu, pakan dan obat-obatan
 - f. Pokdakan Berjuang Bersama, benih kerapu, pakan dan obat-obatan
 - g. Pokdakan Karang Indah, benih kerapu, pakan dan obat-obatan
 - h. Pokdakan Harapan Baru, benih kerapu, pakan dan obat-obatan
 - i. Pokdakan Riak Pantai, benih kerapu, pakan dan obat-obatan
 - j. Kelompok lainnya.

1.4. Output

Terlaksananya tertib administrasi Kegiatan Pusat dan Provinsi Bidang Perikanan Budidaya

1.5. Outcome

Terfasilitasinya Pokdakan Penerima Sarpras dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

BAB. II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penunjang DAK Bidang Perikanan Budidaya meliputi:

- a. Identifikasi dan Verifikasi calon penerima bantuan
- b. Survey Harga Barang
- c. Pembinaan kepada Pokdakan-pokdakan penerima bantuan DAK
- d. Evaluasi bantuan yang telah diberikan

2.2. Realisasi Keuangan dan Fisik

Realisasi keuangan dari kegiatan Penunjang DAK 2019 Bidang Perikanan Budidaya dianalisis menggunakan pengukuran evaluasi kinerja atas aspek implementasi (Permen Keuangan No. 214/PMK.02/2017). Aspek Implementasi yang diukur adalah penyerapan anggaran. Anggaran yang terserap pada Kegiatan Pendampingan Pusat dan Provinsi adalah% (tabel 1).

Tabel 1 Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran			Serapan anggaran
Jumlah	Realisasi	Sisa Pagu	
Rp 16.550.000	Rp. 15.098.150,-	Rp. 1.451.850,-	91,22%

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Dinas Perikanan Tahun 2019

Menurut Permen PMK No. 214/PMK.02/2017, Penyerapan merupakan salah satu bentuk unsur akuntabilitas keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan dikerjakan dengan pengelolaan yang baik. Penyerapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan, pelaksanaan anggaran, komitmen pengelolaan yang baik.

Dokumentasi :

Pokdakan Sumber Sari, Kecamatan Silaut

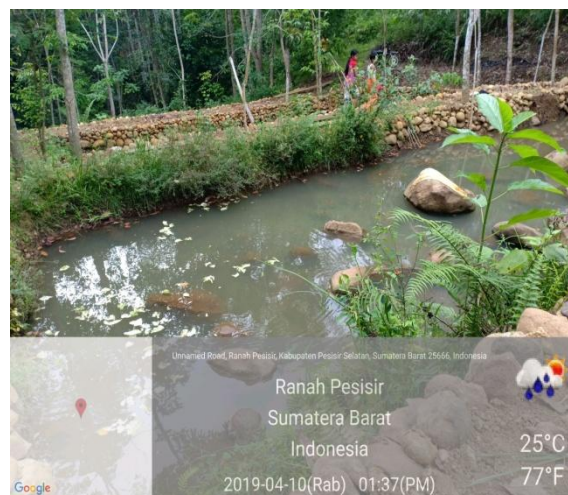
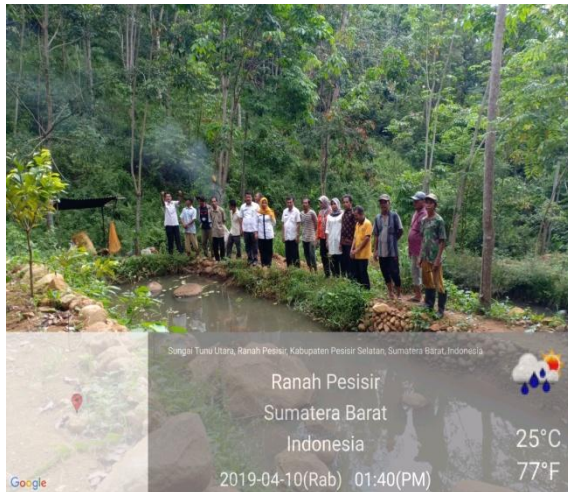


Pokdakan Talun Indah, Kecamatan Pancung Soal



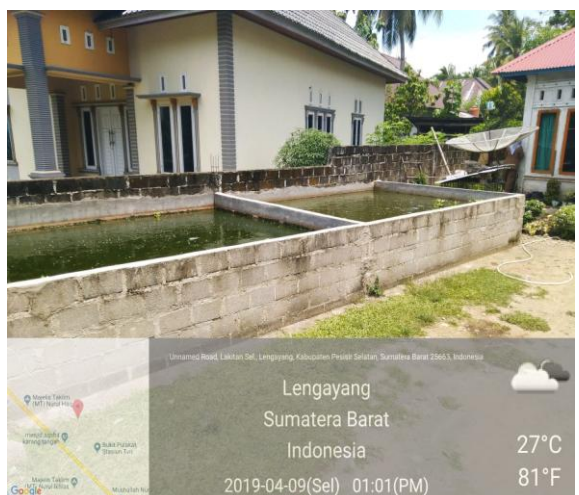
Dokumentasi :

Pokdakan Bukit Punai Sepakat, Kecamatan Ranah Pesisir



Dokumentasi :

Pokdakan Lele Berkah, Kecamatan Lengayang





BAB III

PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

3.1. Permasalahan :

- Benih Ikan yang telah diberikan kepada Penerima Kurang Unggul maka ikan yang telah dipelihara kurang Maksimal pertumbuhannya.
- Bentuk Kolam yang disediakan oleh Penerima Bantuan tidak sesuai dengan standar pembudidaya ikan seperti Air Kolam yang tidak memenuhi standarnya. Kedalaman kolam terlalu rendah.
- Sistem Penangannya untuk pembesaran ikan kurang maksimal
- Ikan yang dipelihara sangat banyak terkena Jamur dan Virus dan mengakibatkan ikan yang dipelihara sangat banyak yang mati.
- Pengelolaan kualitas air dan lingkungan yang kurang dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan menyebabkan kematian ikan.
- Padat tebar ikan tidak memenuhi standar.

3.2. Pemecahan masalah

- Aklimatisasi maksudnya Penyesuaian Suhu air dikolam dengan suhu air dalam plastik packing dengan cara membiarkan ikan yang masih dalam plastik packing tersebut dimasukan kedalam kolam, sehingga ikan dapat beradaptasi dengan lingkungan baru.
- Persiapan kolam sebelum penebaran hendaknya sesuai dengan SNI pemeliharaan ikan yang akan dibudidayakan. Persiapan tersebut meliputi pengapuran, pemupukan dan pengelolaan air masuk dan keluar.
- Proses pemeliharaan sebaiknya juga mengikuti standar yang berlaku, seperti pemberian pakan yang sesuai dengan ukuran ikan dan pengecekan kesehatan ikan.
- Ikan yang telah terkena hama dan penyakit harus dipisahkan dengan cepat dari lokasi pemeliharaan.
- Kedalaman air kolam harus tetap terjaga, sehingga padat tebar sesuai dengan volume kolam.

BAB. IV. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Ikan (DAK 2019) dilakukan pada 13 Kelompok di 7 Kecamatan. Kegiatan DAK 2019 dilakukan sesuai dengan target pekerjaan dan sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Ikan mendapat sambutan baik oleh kelompok pembudidaya ikan tersebut dan termanfaatkan dengan baik. Bantuan yang diberikan melalui Program DAK 2019 diharapkan dapat mewujudkan peningkatan produksi, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan pembudidaya.

5.2. Saran

Pelaksanaan Program Peningkatan diharapkan dilakukan pembenahan dan evaluasi sehingga lebih efektif dan efisien pada program berikutnya.

Demikianlah Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya. Atas Perhatiannya diucapkan terima terima kasih.

KUASA PENGGUNA

ANGGARAN

(KPA)



I. SYAFRI HERFINDO

NIP. 19631009 199302 1 001

Painan, 30 Desember 2019

Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan

(PPTK)

A blue ink signature is written over the text 'DALMASAR, S.Pi'.

DALMASAR, S.Pi

NIP. 19661212 200701 1 008

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. 2018. Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka Pesisir Selatan Regency in Figures 2018. Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan
- Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 79/Per-Djpb/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 54/Per-Djpb/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Prasarana Dan Sarana Budidaya Berbasis Kelembagaan Tahun 2017
- Peraturan.Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 / PMK.02/20 17 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
- Sukadi, FM. 2002. Peningkatain Teknologi Budidaya Perikanan. Jumal Iktiologi Indonesia Vol.2, No. 2,T\2002: 6l-66 ISSN 1693 - 0339